



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah tahun 2025 yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perangkat daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah tahun 2025.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun 2023;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Dinas Perikanan;
 - s. Dinas Pariwisata;
 - t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - v. Sekretariat Daerah;
 - w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - x. Inspektorat;
 - y. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - z. Badan Pendapatan Daerah
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ff. Kecamatan Kinali;
 - gg. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - hh. Kecamatan Talamau;
 - ii. Kecamatan Pasaman;
 - jj. Kecamatan Gunung Tuleh;
 - kk. Kecamatan Lembah Melintang;
 - ll. Kecamatan Ranah Batahan;
 - mm. Kecamatan Sungai Beremas;
 - nn. Kecamatan Sungai Aur;
 - oo. Kecamatan Luhak Nan Duo; dan
 - pp. Kecamatan Koto Balingka.
- (3) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja PD Tahun 2025 Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja PD Tahun 2025 Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Renja PD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja PD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja PD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja PD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja PD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja PD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (21) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja PD Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.
- (25) Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja PD Tahun 2025 Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja PD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja PD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja PD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renja PD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja PD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja PD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Renja PD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (34) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Kinali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Talamau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Pasaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Gunung Tuleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Lembah Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Beremas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (42) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Aur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (43) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (44) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Koto Balingka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Renja PD Tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA PD Tahun 2025.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Agustus 2024



BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 18

LAMPIRAN KE XV PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan 3
1.4	Sistematika Penyusunan 4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2023..... 6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Renstra DPMPTSP..... 6
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 41
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 46
2.5	Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat 56
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 57
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 57
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 57
3.3	Program dan Kegiatan 60
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 77
BAB V	PENUTUP 91

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas yang sangat antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Selanjutnya, Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasarannya dengan pemerintah pusat (Kementerian Investasi/BKPM RI) dan pemerintah propinsi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat. Salah tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu meningkatkan Nilai Investasi Daerah yang selaras dengan Renstra BKPM RI adalah Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal, dimana juga selaras

dengan tujuan Renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan pertumbuhan investasi.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan sebagai acuan dalam meningkatkan investasi daerah dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan investasi daerah melalui promosi dan pengembangan iklim investasi.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan terintegrasi secara elektronik.

1.4 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran halaman 399 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika Penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra* Perangkat Daerah, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan

- formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif), dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025
- BAB V : PENUTUP
Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2023. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran 2024, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 adalah sebagai berikut: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1(TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan.Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.18	Bidang urusan Peanaman Modal									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100,00	6 dok	18 dok	60,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 lap	2 dok	2 lap	2 lap	100,00	2 lap	6 lap	60,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100 %	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00

2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 PNS	33 PNS	28 orang / bulan	33 orang/ bulan	100,00	35 PNS	35 pns	94,59
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dok	12 dok	100,00	12 dokumen	28 dok	46,67
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan engujian/Verifikasi	60 dokumen	12 bulan	12 dokumen	12 dok	100,00	12 dokumen	36 dok	60,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPPTSP	335 unit	329 unit	331 unit	331 unit	100,00	332 unit	332 unit	99,10
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	60 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	12 dokumen	24 dokumen	40,00
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100,00
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target PAD Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	90%	-	-	-	-	90%	90%	100,00
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dok	100,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPPTSP	90 %	100 %	90 %	90 %	100%	90 %	90 %	100%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 orang	-	-	-	-	53 orang	53 orang	100,00
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	30 Orang	20 orang	-	-	5 orang	35 orang	100,00
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	-	-	-	-	10 orang	10 orang	100,00

2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100,00	10 orang	30 orang	60,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100 %	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 paket	10 paket	5 paket	5 paket	100,00	6 paket	21 paket	67,74
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100,00	5 paket	13 paket	52,00
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	4 paket	3 paket	3 paket	100,00	4 paket	11 paket	55,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	33 paket	9 paket	5 paket	5 paket	100,00	6 paket	20 paket	60,61
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 laporan	75 laporan	20 laporan	45 laporan	100,00	25 laporan	145 laporan	100,00
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dok	100,00
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dok	100,00

2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100 %	100%	100%	-	-	100%	100%	100,00
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100,00
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 unit	4 unit	-	-	-	12 unit	16 unit	88,89
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	21 unit	-	-	-	17 unit	38 unit	100,00
2.18.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100,00
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100,00
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 paket	-	-	-	1 unit	2 unit	100,00
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 paket	-	-	-	1 unit	2 unit	100,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	24 laporan	40,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	36 laporan	60,00

2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	20,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	2 orang	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	24 laporan	40,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPSTP	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	17 unit	21 unit	21 unit	100,00	21 unit	21 unit	100,00
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 unit	-	-	-	-	12 unit	12 unit	66,67
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	49 unit	45 unit	45 unit	100,00	50 unit	50 unit	83,33
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100,00	2 unit	2 unit	100,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	100,00
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	100,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMDN/ PMA	362.88 Miliar	910,36 Miliar	52 Miliar	812,33 Miliar	100,00	53 Miliar	1.775,69 Miliar	100,00

2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	90%	0	80%	90%	100,00	80%	90%	100,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	66,67
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	-	-	-	-	50 dokumen	50 dokumen	100,00
2.18.02.2.01.04	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi Kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	90%	-	-	-	-	90%	90%	100,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 peraturan	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.18.02.2.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi	3 daerah	-	-	-	-	1 daerah	1 daerah	33,33%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	0	-

2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33,33
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kesepakatan Investasi yang dikeluarkan	3 Mou	0 Mou	-	-	-	-Mou	0	-
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	1 dok	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	5 dokumen	3 kegiatan	-	-	-	1 dok	4 dokumen	80,00
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 dokumen	1 dok	-	-	-	1 dokumen	2 dokumen	66,67
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	86%	83,55%	85,45%	83,31%	97,50	85,45%	84,10%	97,79
2.18.042.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	90%	80%	84%	85%	100,00	84%	83%	92,22
2.18.042.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	33,33
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	3200 pelaku usaha	5943 pelaku usaha	2500 Pelaku Usaha	3072 Pelaku Usaha	100,00	-	9015 pelaku usaha	100,00

		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8300 pelaku usaha	-	-	-	-	2600 pelaku usaha	2600 pelaku usaha	31,33
2.18.04.2.01.07	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	41 orang	10 orang	54 orang	100,00	-	95 orang	100,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	30 pelaku usaha	-	-	-	-	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	33,33
2.18.04.2.01.08	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.042.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat	140 kegiatan usaha	-	-	-	-	125 Kegiatan usaha	125 kegiatan usaha	89,29

	risiko	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha								
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	10%	100%	-0,8%	-16,15%	0	2.8 %	86,65%	100,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	45 laporan	67 laporan	30 laporan	167 laporan	100,00	30 laporan	264 laporan	100,00
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	33 kegiatan usaha	93 kegiatan usaha	29 kegiatan usaha	167 kegiatan usaha	100,00	-	260 kegiatan usaha	100,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 perusahaan	14 pelaku usaha	350 pelaku usaha	765 Pelaku usaha	100,00	-	779 pelaku usaha	100,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 kegiatan usaha	80 kegiatan usaha	32 kegiatan usaha	95 Kegiatan Usaha	100,00	-	175 kegiatan usaha	100,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	96 kegiatan usaha	-	-	-	-	5 kegiatan usaha	5 kegiatan usaha	5,21

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	15 pelaku usaha	-	-	-	-	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	100,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan pelaksanaan perizinan berusaha	108 kegiatan usaha	-	-	-	-	34 Kegiatan Usaha	34 kegiatan usaha	31,48
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	Ada (100)	Ada (100)	Ada (100)	100,00	Ada (100)	Ada (100)	100,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	90%	85%	50%	65%	100,00	50%	66,66%	74,07
2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	2 dok	1 dok	1 dokumen	1 dokumen	100,00	-	2 dokumen	100,00

		Dimanfaatkan								
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 dokumen	-	-	-	-	1 dok	1 dokumen	33,33

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel diatas dapat dijelaskan pada tabel 2.1.1 dibawah ini.

Tabel 2.1.1

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan pada Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal pada RKPD Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	4	5	8		12		13		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kab/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.241.818.347	100%	3.979.149.389	100,00	93,81	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100%	80.103.700	100%	71.326.650	100,00	89,04	Sangat Tinggi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	52.702.500	6 dok	49.860.400	100,00	94,61	Sangat Tinggi
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	27.401.200	2 lap	21.466.250	100,00	78,34	Sangat Tinggi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100%	3.654.918.089	100%	3.373.489.407	100,00	92,30	Sangat Tinggi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang / bulan	3.500.554.089	33 orang/ bulan	3.230.452.407	100,00	92,28	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	56.664.000	12 dok	43.872.000	100,00	77,42	Sangat Tinggi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	97.700.000	12 dok	99.165.000	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPSTP	331 unit	25.700.000	331 unit	10.200.000	100,00	39,69	Sangat Tinggi
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.700.000	1 dok	10.200.000	100,00	39,69	Sangat Tinggi
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	-	-	-	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPSTP	90%	35.208.000	90%	21.911.000	100,00	62,23	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-			-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	5 orang	11.050.000			-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang	5.000.000	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	24.158.000	10 orang	21.911.000	100,00	90,70	Sangat Tinggi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100%	139.720.144	100%	202.950.356	100,00	145,25	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	3.850.000	5 paket	8.100.000	100,00	210,39	Sangat Tinggi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	16.510.850	4 paket	27.649.000	100,00	167,46	Sangat Tinggi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	4.416.244	3 paket	8.432.164	100,00	190,94	Sangat Tinggi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	2.660.000	5 paket	3.700.000	100,00	139,10	Sangat Tinggi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang diberi fasilitas	1 laporan	-	-	-	-	-	
3	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	112.283.050	45 laporan	155.069.192	100,00	138,11	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah ASN Yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Aplikasi Yang digunakan untuk penunjang pelayanan perkantoran	1 dokumen	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	21.590.030	100%	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	21.590.030	-	-	-	-	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-			-	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	149.925.784	100%	140.400.851	100,00	93,65	Sangat Tinggi
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	15.562.900	12 laporan	16.494.400	100,00	105,99	Sangat Tinggi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan	52.770.720	12 laporan	43.361.435	100,00	82,17	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
		Disediakan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	81.592.164	12 laporan	80.545.016	100,00	98,72	Sangat Tinggi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPSTP	100%	134.652.600	100%	158.871.125	100,00	117,99	Sangat Tinggi
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	30.700.000	21 unit	36.640.250	100,00	119,35	Sangat Tinggi
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Akan Dilakukan Pemeliharaan	10 unit	-		-	-	-	Sangat Tinggi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	95.520.600	45 unit	82.178.875	100,00	86,03	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	8.432.000	2 unit	40.052.000	100,00	475	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMDN/ PMA	52 Miliar	75.860.000	812,33 Miliar	64.243.834	100,00	84,69	Sangat Tinggi
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dokumen pendukung pengembangan iklim penanaman modal	80%	75.860.000	90%	64.243.834	100,00	84,69	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	75.860.000	1 dokumen	64.243.834	100,00	84,69	Sangat Tinggi
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan usaha	-	-	-	-	-	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	90%	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 peraturan	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dok	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	-Mou	-			-	-	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 dok	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dok	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,45%	190.958.600	83,31%	186.269.757	97,50	97,54	Sangat Tinggi
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	84%	190.958.600	85,00%	186.269.757	100,00	97,54	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 pelaku usaha	150.923.750	3072 Pelaku Usaha	146.291.957	100,00	96,93	Sangat Tinggi
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120 kali	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	40.034.850	54 orang	39.977.800	100,00	99,86	Sangat Tinggi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 kegiatan usaha	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	-0.8 %	512.881.500	-16,15%	462.778.800	100,00	90,23	Sangat Tinggi
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	30 laporan	512.881.500	167 Laporan	462.778.800	100,00	90,23	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	29 kegiatan usaha	22.481.500	167 Kegiatan Usaha	15.227.250	100,00	67,73	Sangat Tinggi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan PM	350 pelaku usaha	400.382.650	765 Kegiatan usaha	364.399.600	100,00	91,01	Sangat Tinggi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	32 Kegiatan Usaha	90.017.350	95 Kegiatan usaha	83.151.950	100,00	92,37	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	15.998.900	Ada (100)	15.783.150	100,00	98,65	Sangat Tinggi
	Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	50%	15.998.900	65%	15.783.150	100,00	98,65	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Kriteria Realisasi Kinerja
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dok	15.998.900	1 dok	15.783.150	100,00	98,65	Sangat Tinggi
	Jumlah		2	5.037.517.347		4.708.224.930	100,00	96,54	

Berdasarkan tabel 2.1.1 di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi kinerja program Tahun 2023 adalah 461,55%, sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 57,43% persen dari pagu indikator RKPD. Realisasi program sudah melebihi target pada tahun 2023. Realisasi Keuangan sudah mencapai 96,54% dari pagu anggaran APBD 2023.

Selain itu, ada beberapa sub-kegiatan pada RKPD yang tidak didanai pada APBD Tahun 2023, karena keterbatasan ketersediaan anggaran pada APBD Tahun Tahun Anggaran 2023:

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
Pada sub kegiatan ini rencana awalnya terdiri dari honorarium pengurus barang (BMD), karena isinya hanya honorarium, maka rekening sub kegiatan ini ditumpangkan ke sub kegiatan lain, yaitu pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
Sub Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran APBD Tahun 2023.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran pada perubahan APBD Tahun 2023.
- 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan ini juga tidak terlaksana, tetapi sosialisasi tetapi dilaksanakan pada sub kegiatan lain yaitu dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 6) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Pada sub kegiatan ini rencana awalnya terdiri dari honorarium pengelola arsip, karena isinya hanya honorarium, maka rekening sub kegiatan ini ditumpangkan ke sub kegiatan lain, yaitu pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD;
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 8) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 9) Pengadaan Mebel
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 10) Pengadaan Aset Tak Berwujud
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 11) Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 12) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

- Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
- 13) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 15) Pemeliharaan Mebel
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 16) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 17) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 18) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Sub Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena Perda Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal baru ditetapkan pada bulan November 2023, sehingga belum dilakukan evaluasi.
 - 19) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena RUPM belum bisa direvisi terkendala pada penyusunan RTRW Kab Pasaman Barat belum ditetapkan.
 - 20) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 21) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 22) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023
 - 23) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sub kegiatan ini juga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2023, tetapi pelaksanaannya ditumpangkan pada sub kegiatan lai, yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 24) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Sub Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan karena Perda Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal baru ditetapkan pada bulan November 2023.

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sudah terealisasi sesuai dengan target kinerja, kecuali beberapa sub kegiatan yang tidak terakomodir akibat keterbatasan anggaran yang diperuntukan pada DPMPTSP.

Pada program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terjadi peningkatan capaian kinerja yaitu mencapai >100 %, dengan kategori sangat tinggi, hal ini disebabkan karena sumber data diambil dari jumlah realisasi investasi tahun 2023 pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal, sedangkan pada tahun 2022 sumber data diambil dari rencana awal penanaman modal yang dilaporkan pada NIB (Nomor Induk Berusaha). Selain itu dalam penetapan target kinerja awal pada Renstra 2021-2026t terjadi saat wabah Covid 19, sehingga jumlah realisasi pada saat itu sangat rendah yang berdampak besar terhadap perekonomian secara global.

Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2023 sesuai RPJMD dan RKPD tahun 2023 tidak memiliki target yakni 0. Kegiatan dan sub kegiatan pada program tersebut juga tidak dianggarkan pada APBD tahun 2023 sehingga tidak memiliki realisasi capaian kinerja. Alasan tidak dianggarkan karena keterbatasan APBD tahun 2023 sehingga DPMPTSP memilih membagi anggarannya ke program yang lebih prioritas.

Namun pada tahun 2021 sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dianggarkan dan terlaksana. Pada tahun 2022 sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan dan terlaksana.

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik memiliki faktor penghambat pada saat pemekaran nagari terjadi. Faktor penghambat tersebut berupa selisih data alamat pelaku usaha dalam sistem aplikasi perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan data Pencatatan Sipil. Kemudian faktor penghambat lainnya yakni terlambatnya rekomendasi izin tim teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait yang menaungi per urusan perizinan, seperti Dinas Pekerjaan Umum terkait PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), Dinas Kesehatan terkait Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup terkait Perizinan Lingkungan .

Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan, capaian kinerja melebihi target kinerja pada Tahun 2023, yaitu 540 % dengan kategori sangat tinggi. Dari hasil capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya capaian kinerja disebabkan karena setiap pengaduan selalu ditindaklanjuti dan dibuatkan laporannya, sehingga tidak ada laporan pengaduan yang diabaikan. Faktor pendukung lainnya pada sub kegiatan ini adalah pelayanan pengaduan bisa dilakukan via online yakni melalui aplikasi Whatsapp dengan mengisi form pengaduan. Pelayanan melalui Whatsapp tersebut merupakan salah satu inovasi DPMPTSP yang diberi nama “Ladu Melawas” (Layanan Pengaduan Melalui Whatsapp). Inovasi ini telah ada sejak tahun 2021.

Kenaikan realisasi investasi pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2023 yaitu -16,15%, capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan karena terjadi penurunan investasi baru pada tahun 2023. Faktor penghambatnya karena Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang tidak tertib

oleh perusahaan/investor yang dinyatakan wajib LKPM dan laporan tidak transparan mengenai investasi awal atau penambahan investasi .

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, realisasi capaian kinerja sebanyak 575,86 % dengan kategori sangat tinggi, karena realisasi kinerja melebihi target kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah perusahaan yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Setiap perusahaan wajib membuat laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dilaporkan setahun 2 kali per semester. Faktor pendukung dalam sub kegiatan ini berupa sistem pelaporan LKPM bagi kegiatan usaha secara online. Sistem tersebut bernama OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana melalui sistem OSS RBA ini, laporan kegiatan usaha dapat langsung diterima oleh tingkat pusat. Tingkat Kabupaten/Kota dapat juga mengakses laporan tersebut untuk dirangkum. Faktor penghambat pada sub kegiatan ini adalah kesadaran perusahaan untuk melaporkan kegiatan usahanya secara transparan dan tepat waktu.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan melakukan bimtek terhadap pelaku usaha dan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha dengan Perangkat Daerah teknis terkait. Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini sangat tinggi yaitu 218,57 %.Faktor pendukung pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan sub kegiatan diakomodir dengan anggaran DAK Non Fisik dan pada tahun 2023 anggaran DAK Non Fisik sekitar 400 juta rupiah. Faktor pendukung lainnya adalah terdapat tenaga pendamping khusus investasi yang dianggarkan dengan dana DAK untuk mendampingi pelaku usaha.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu 296,88 %. Faktor pendukung dengan ditetapkannya SK Tim pengawasan penanaman modal yang terdiri dari tim lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini juga didukung oleh anggaran DAK Non Fisik, sehingga kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat terlaksana dengan baik dan realisasi kinerja melebihi target kinerja yang ditetapkan. Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan aturan atau legalitas merupakan faktor penghambat pada pelaksanaan sub kegiatan ini.

Sub kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memiliki faktor pendukung yakni inovasi “Sapa Pinter” (Sistem Aplikasi Perizinan Terintegrasi). Inovasi ini berupa sistem aplikasi yang mempermudah pengelompokan data perizinan sesuai dengan jenis izin, wilayah/lokasi dan sektor/jenis usaha. Aplikasi mengambil data mentah dari sistem OSS RBA, siCANTIK untuk perizinan kesehatan, dan SIMBG untuk perizinan bangunan/gedung. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 100%.

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program teknis dan 1 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 27 subkegiatan.Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 5 indikator sasaran sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTP Tahun 2021-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal difokuskan pada Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Kinerja penyelenggaraan urusan diukur dengan Kenaikan nilai investasi di kab/kota dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu. Pada Tahun 2023, nilai IKM Perizinan di Kabupaten Pasaman Barat adalah 83,31. Sementara itu, target pada RKPD Tahun 2023 adalah 85,45. Artinya, capaian kinerja di akhir Tahun 2023 tidak mencapai target kinerja Tahun 2023. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kinerja pada Tahun 2024.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu
Tahun 2023 dan Target RKPD Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Tercapai (sudah ✓/ belum x)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	BB	B	✓
		Level Maturitas SPIP	3	3	3	✓
		Persentase Penurunan jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan	50%	50%	40%	✓
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,45	83,31	85,60	x

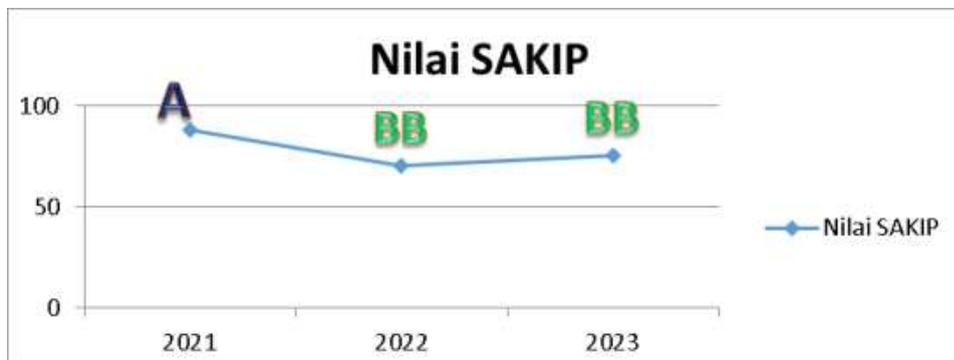
3	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	1,96%		- 16,15%	x
---	---------------------------------------	-----------------------------------	-------	--	----------	---

Dari tabel diatas diketahui dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Tahun 2023, yakni 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 (satu) kinerja pendukung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan 3 indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP tahun 2023 capaian kinerja nya sudah 100%, realisasi kinerja yaitu BB melebihi dari yang ditargetkan yaitu B dan data diambil dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insytansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 Nomor : 700.1.2.1/06/Inspekt-LHE/IX/2023 tanggal 18 September 2023. Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022 sama dengan tahun 2023 yaitu BB dengan capaian kinerja 100%. Nilai SAKIP Tahun 2021 yaitu B diambil berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun 2020 dan Untuk target tahun 2024 Nilai SAKIP ditargetkan benilai B. Berikut interval realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021-2023 :



2. Level maturitas SPIP

Untuk indikator capaian level maturitas SPIP, penilaian dilaksanakan secara mandiri dan hasilnya dievaluasi oleh BPKP Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi pada K/L/D. Dari laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat Nomor : PE.09.03/LHP-582/PW03/3/2022, Tanggal : 23 desember 2022. Penilaian dievaluasi secara menyeluruh yaitu tingkat Kabupaten Pasaman Barat, hasil penilaian maturitas Penyelenggaraan

SPIP hasil evaluasi yaitu berada pada level 3 (tiga) dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,721	3,132	-0,589
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,025	3,106	-0,919
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,832	-0,168

Sumber : Laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat, 2022

3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK

Indikator capaian Persentase penurunan jumlah temuan BPK tahun 2023 yaitu 50% data diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 04/LHP/XVIII.PDG/01/2023, Tanggal 11 Januari 2023 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dinas Penanaman Modal yang diaudit oleh BPK RI. Nilai capaian kinerja nya yaitu 100%., karena ada 1 (satu) temuan BPK RI yaitu perjalanan Dinas Tenaga Harian lepas yang menyalahi aturan. Untuk Tahun 2021 dan tahun 2022 capaian kinerja juga 100% , data diambil dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 dan

Tahun 2022 dan ditargetkan pada tahun 2024 penurunan jumlah temuan BPK yaitu 60%.

Cara pengukuran indikator :

Persentase penurunan temuan BPK =

$$= \frac{\text{Jumlah temuan BPK tahun 2023} - \text{Jumlah temuan BPK tahun 2022}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/atau inspektorat tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 - 2}{1} \times 100\%$$

$$= -50\%$$

2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang Berkualitas dengan Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan berada pada level Memuaskan dengan hasil 83,314 dari target 85,45 . Dimana capaian kinerja pada Tahun 2023 mengalami penurunan 2,13% dengan capaian kinerja 97,30% dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja yaitu 100,36% (melebihi target kinerja). Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

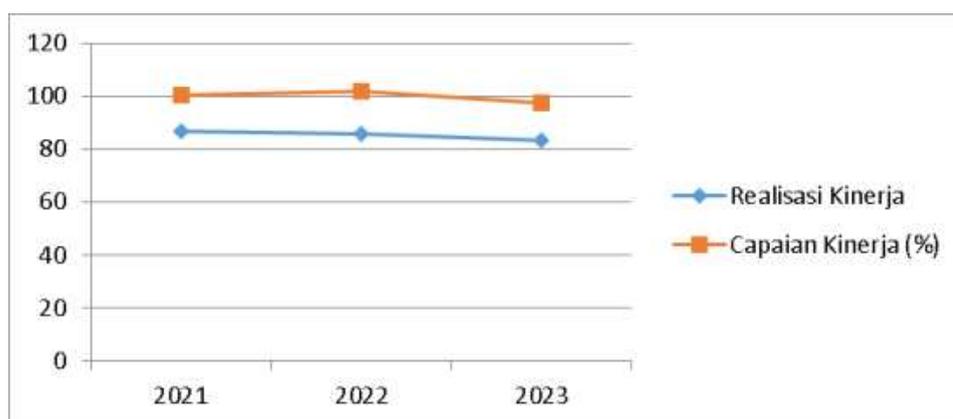
A. Pada Tahun 2023 pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bekerjasama dengan pihak Akademisi (Universitas Andalas), pengambilan sampel lebih luas dan spesifik dengan survey langsung ke masyarakat dikecamatan, sehingga hasil pengukuran IKM lebih akurat. Dibandingkan pada tahun 2022 pelaksanaan Survey IKM dilakukan secara mandiri dengan penyebaran kuisioner Survey IKM kepada pemohon perizinan yang mengurus

izin pada loket pelayanan perizinan DPMPTSP, sehingga pengambilan sampel sangat terbatas dan hasilnya kurang akurat.

B. Perbandingan Realisasi, Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Dan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			CAPAIAN			TARGE
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,73	85,56	83,31	100,36%	101,86%	97,49%	85,60

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kinerja capaian kinerja indikator kinerja nilai survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target Nilai Interval Konversi IKM 85,45 terealisasi sebesar 83,31 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,49% dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan , yakni sebesar 2,25%. Tingkat capaian kinerja ini mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 2,87% dibandingkan dengan Tahun 2022 tahun 2021, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



C. Ada beberapa unsur penilaian yang menjadi prioritas utama untuk diperhatikan dan ditingkatkan oleh DPMPTSP dan menjadi keluhan bagi masyarakat, yaitu:

- a. Persyaratan tidak relevan dengan usaha mereka.
- b. Tumpang Tindih Regulasi
- c. Prosedur yang masih panjang
- d. Jangka waktu yang tidak jelas
- e. Perilaku Petugas pelayanan yang kurang memuaskan

3. Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA dengan indikator sasaran Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA.

- a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Target Kinerja 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			CAPAIAN			TARGET 2024
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA							
	*Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	265,65 Milyar	95,068 Milyar		537,3%	186,4%		
	**Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	-49,64%	165,46%	-16,15%			-823,97%	1,96%
	*Perhitungan	Nilai Investasi Tahun n						
	**Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Realisasi Tahun n} - \text{Nilai Realisasi Tahun n-1}}{\text{Nilai Realisasi Tahun n-1}} \times 100\%$						

- b. Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja Kurang Baik sebesar -823,97%, dimana Kenaikan Nilai Investasi PMA dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Untuk tahun 2023, Kenaikan Nilai Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar 1,96% dan terealisasi sebesar -16,15%.
- c. Berdasarkan Rencana Strategi Perubahan tahun 2021-2026 pada tahun 2023 terjadi perubahan perhitungan target indikator Sasaran Strategis “Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA”. Pada tahun 2021 dan Tahun 2022, perhitungan target indikator yaitu nilai realisasi tahun n yang datanya bersumber dari rencana awal investasi yang dilaporkan investor pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha >500juta, sedang tahun 2023 target indikator yaitu pertumbuhan nilai realisasi investasi yang datanya bersumber dari jumlah realisasi investasi yang dilaporkan investor melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal setiap triwulan/semester, dengan perhitungan :

$$\frac{(\text{Jumlah realisasi investasi tahun n} - \text{jumlah realisasi investasi tahun n-1})}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun n-1}} \times 100\%$$

Sehingga untuk capaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan sesuai dengan target dan realisasi.

. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi investasi tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

- a. Jumlah investasi baru yang berkurang pada tahun 2023 dibanding tahun 2022.
- b. Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang tidak tertib oleh perusahaan/investor yang dinyatakan wajib LKPM dan laporan tidak transparan mengenai investasi awal atau penambahan investasi .
(tambah tabel perhitungan)

Tabel 2.2 (T-C-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Kenaikan Nilai Investasi			50 M	51 M	52 M	53 M	54 M	55 M	268,6 M	-16,16 %	1,96%	1,96%	1,96%	Realisasi Tidak Mencapai Target
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86	85,56	83,31	85,60	85,85	86	Realisasi Tidak Mencapai Target
3	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	Target Realisasi Tercapai
4	Level SPIP			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Target Realisasi Tercapai
5	Persentase Penurunan jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan			30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	Realisasi Melebihi Target

Sumber : Renstra Perubahan 2021-2026 DPMPSTSP 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil pengukuran tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasinya sudah mencapai target dan bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sangat mempengaruhi hasil kinerja yang bernilai positif, sehingga tidak ada hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Program Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

Tabel 2.3.1
Isu- Isu Penting Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat

TUPOKSI	Isu penting	Rekomendasi / Tindak lanjut
A. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pntu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah; 2. Belum adanya peta potensi dan peluang investasi 3. Belum adanya RTRW/RDTR sebagai pedoman investasi di Kab. Pasaman Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP perizinan dan non perizinan sesuai aturan yang berlaku 2. Menyusun peta potensi dan peluang investasi 3. Koordinasi dengan Dinas terkait dalam penyusunan RTRW /RDTR daerah Kab. Pasaman Barat
B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. 2. Sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan pengaduan belum optimal 3. Penyampaian laporan LKPM tidak tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi promosi investasi 2. Melengkapi kebutuhan sanpras pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik 3. Pemantauan perusahaan ke lapangan dan memberikan teguran tertulis
A. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	<ul style="list-style-type: none"> . Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di daerah . Kualitas SDM belum optimal. . Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dan sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan Kegiatan Penanaman Modal di daerah melalui bimtek pelaku usaha dan sosialisasi 2. Adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam menambah pengetahuan SDM 3. Terciptanya inovasi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan

Sumber : DPMPTSP Kab. Pasaman Barat, 2023

Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja DPMPTSP dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPSTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”				
	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif				
1	Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelayanan Perizinan - sarana dan prasarana - Kualitas SDM - Kurangnya Dukungan dana dari TAPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah adanya Perbup tentang SOP Pelayanan perizinan - Komitmen Pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Adanya aplikasi online dari pemerintah pusat dalam memudahkan proses pelayanan perizinan (OSS RBA dan Si Cantik).
2	Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal	Aplikasi pengolahan data yang belum terintegrasi dengan aplikasi perizinan online	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengiriman data perizinan dan perizinan sesuai dengan permintaan instansi terkait
Misi 3 : “Mewujudkan perekonomian yang tangguh , berdaya saing dan inklusif”				
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online .	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Penerapan sanksi yang belum tegas - Belum tertibnya penyampai LKPM PMA/PMDN 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perka yang yang mengatur tentang tata cara pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal (Perka No 6 Tahun 2020)
4	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Pasaman Barat - Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkan penyusunan RTRW/RDTR yang dilaksanakan oleh dinas teknis - Peta Potensi dan Peluang Investasi belum dibuat karena terkendala dengan RTRW/RDTR yang belum ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal - Sudah adanya Perda mengenai Fasilitas/insentif kemandirian penanaman modal
5	Promosi Penanaman Modal	Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang bel dirumuskan secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal - Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang - RTRW/RDTR yang belum ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Peluang Investasi yang cukup banyak dapat dipromosikan

Dari uraian permasalahan pada table diatas ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja DPMPTSP, dalam hal ini faktor penghambat dapat dikendalikan pada program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Selain itu faktor pendukung sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Untuk melihat keselarasan tujuan dan sasaran visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat terhadap program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat berikut penjelasannya pada table berikut :

Tabel 3.4

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN BKPM RI, DPMPTSP PROPINSI SUMATERA BARAT DAN DPMPTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT

BKPM RI		DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat		DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
<p>1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima</p>	<p>1.Meningkatnya realisasi penanaman modal;</p> <p>2.Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan</p> <p>3.Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.</p>	<p>1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi</p>	<p>1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat</p> <p>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>1. Meningkatkan Pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatkan investasi didaerah</p>	<p>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan</p> <p>2. Meningkatkan Nilai Investasi di daerah</p>

Sumber : Renstra 2021-2026 DPMPTSP

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, perlunya keselarasan tujuan dan sasaran dari tingkat Nasional, Propinsi dan Daerah, agar tercapainya target yang telah ditetapkan, karena dalam penyelesaian permasalahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pada DPMPTSP sangat didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat dan propinsi, seperti : aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam proses pelayanan perizinan dengan system aplikasi online dan terintegrasi secara elektronik serta pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan secara online oleh investor melalui LKPM online, sehingga dapat memantau kegiatan penanaman modal di daerah.

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada DPMPTSP sebagai berikut :

1. Berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Pasaman Barat menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan menjadikan usaha masyarakat mempunyai legalitas dalam rangka mendukung program percepatan berusaha di daerah.
2. Faktor rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia menjadi tantangan dalam pengembangan iklim investasi salah satunya yaitu masih adanya masyarakat yang menolak adanya investasi akibat pola pikir yang salah dan kurangnya informasi sehingga berdampak pada kegiatan penanaman modal di daerah .

Dari tantangan tersebut ada beberapa peluang yang dapat diambil yaitu :

1. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah, baik dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan maupun sektor pariwisata. Hal itu menjadi peluang untuk meningkatkan nilai investasi.
2. Kebijakan/Aturan terkait dengan Perizinan dari tingkat pusat maupun propinsi sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin di daerah yaitu pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2025, jumlah Plafon Belanja Operasi Sementara yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp.5.060.701.897,- (Lima Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh rupiah)

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: DPMPTSP Kab. Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Lokasi	Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)		
1	3	4	5	6	3	4	5	6	7	13
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3.601.107.701	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.060.701.897,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.601.107.701	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.060.701.897,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.601.107.701	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.060.701.897,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.132.919.429	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.575.960.347,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	70.346.052	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	76.824.100,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	51.233.251	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.093.100,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	19.112.801	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	25.731.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100 %	2.352.352.423	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100%	3.410.644.907,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 PNS	2.267.332.423	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.335.464.907,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	85.020.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.180.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPSTSP	333 unit	14.206.610	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPSTSP	333 unit	11.050.000,00		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	14.206.610	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.050.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPSTSP	90 %	28.440.044	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPSTSP	90%	31.395.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	9.773.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	

									Kel/Desa	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	18.440.044	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	16.622.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100 %	156.576.872	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100%	120.713.480,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	5.327.796	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.727.880,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	40.130.316	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16.766.600,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	4.320.426	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.064.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	27.838.212	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	3.003.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	78.960.123	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	90.152.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100 %	133.663.958	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	477.290.000,00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	12.100.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	7.500.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	73.163.958	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	86.710.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.100.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	134.780.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	24.200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.200.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	131.100.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %	121.950.068	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	162.665.360,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.415.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.887.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63.119.868	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.189.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	29.415.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.589.360,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPSTP	100 %	255.383.402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPSTP	100%	285.377.500,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	80.325.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	38.750.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	24.200.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit	1.600.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	75.445.678	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	92.627.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	24.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	102.800.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	39.111.874	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.600.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
167	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMDN/ PMA	54 Miliar	100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMDN/ PMA	54 Milyar	44.616.000,00		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80 %	80.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80%	25.077.000,00		

	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	40.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.624.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	40.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	14.453.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	90 %	20.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	1 peraturan	19.539.000,00		
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.539.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
168	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	- MoU	64.306.069	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	0 MoU	48.791.000,00		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	64.306.069	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	48.791.000,00		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	24.306.069	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	41.891.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
169	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85.85 %	214.745.078	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,85%	32.971.000,00		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	88 %	214.745.078	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	88%	32.971.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dok	30.754.078	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.821.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 pelaku usaha	160.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	6.900.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 orang	23.991.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 Pelaku Usaha	11.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
170	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	6.4 %	38.201.625	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	6,40%	324.969.000,00		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	40 laporan	38.201.625	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	40 laporan	324.969.000,00		
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	32 kegiatan usaha	16.201.625	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	21.570.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 pelaku usaha	10.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	272 Pelaku Usaha	294.099.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36 Kegiatan Usaha	12.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17 Kegiatan Usaha	9.300.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
171	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	50.935.500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	33.394.550,00		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	70%	50.935.500	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	70%	33.394.550,00		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	50.935.500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	33.394.550,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.601.107.701 ,- (Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Searatus tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah). Dari hasil analisa kebutuhan perlunya tambahan anggaran sebesar Rp. 5.060.701.897,00.- (Lima Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Penambahan anggaran ini sesuai dengan analisa kebutuhan yaitu perkiraan kenaikan harga barang, bahan bakar minyak dan kebutuhan sarana prasarana pendukung operasinal kantor dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RPJMD Periode 2021-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dari masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang tertampung dalam rancangan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan tidak bersumber dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari perguruan tinggi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan serta nyata oleh semua pemangku kepentingan

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Lima program prioritas yang disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato setelah pelantikan sebagai presiden untuk periode 2020 – 2024, adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang bekerja keras, dinamis dan terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang memudahkan akses ke kawasan wisata dan yang mendongkrak lapangan kerja baru serta memberika nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi harus dipotong dan dipangkas.
4. Penyederhanaan Birokrasi akan terus dilakukan besar besaran, sehingga investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan diprioritaskan.
5. Transformasi ekonomi, dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah yang tinggi bagi kemakmuran bangsa.

Adapun sasaran dari kelima prioritas yang akan dilaksanakan tersebut, sub agendanya adalah:

- Menciptakan layanan satu atap untuk investasi terintegrasi secara elektronik
- Efisiensi Perizinan bisnis menjadi maksimal 5 hari.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Kepala Daerah dalam RPJMD yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Meningkatkan Investasi di daerah

Berdasarkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan

sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran disusun sebagai instrumen yang menggambarkan / menjelaskan kondisi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan isu strategis daerah dan kesesuaiannya terhadap misi kepala daerah, tupoksi dan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2021-2026. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2025
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	B
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP	B
			2. Level Maturitas SPIP	3
			3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	70 %
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Nilai IKM Perizinan	85,85
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,85
3	Meningkatkan investasi di daerah		Kenaikan Nilai Investasi daerah	1,96%
		Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN /PMA	1,96%

Sumber : Renstra 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran. Ada 3 (tiga) Program Prioritas DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Iklim Investasi penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Kabupaten Pasaman Barat dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di propinsi Sumatera Barat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Menyikapi keadaan geografis Kabupaten Pasaman Barat yang rawan bencana, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Peluang investasi di Kabupaten Pasaman Barat yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut:

· Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah

Sub Kegiatan :

- Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

· Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- Penyediaan Peta Potensi Kabupaten/Kota

b. Program Promosi Penanaman Modal

Dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu ditingkatkan kegiatan promosi penanaman modal dalam bentuk promosi dimedia cetak, mediaelektronik dan pameran investasi serta pembuatan feasibility study potensi investasi. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di kabupaten Pasaman Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal serta pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan perizinan. Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Penanaman Modal adalah:

· Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas/insentif.
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko terintegrasi secara elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang penting dilaksanakan untuk memantau dan mengawasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat guna menghitung realisasi investasi yang dipantau melalui laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM), yang mana perusahaan wajib melaporkan setiap semester melalui aplikasi SPIPISE secara online. Selain itu juga dilakukan

kegiatan pembinaan yang bertujuan memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

· Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya
- Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dengan adanya program ini, penyusunan dan pengolahan data dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan instansi terkait dan terintegrasi secara elektronik.

Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

· Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara elektronik

Sub Kegiatan :

- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Tabel 3.3
Rumusan dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.060.701.897,00						3.717.982.331,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.060.701.897,00						3.717.982.331,00
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.060.701.897,00						3.717.982.331,00
166	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.575.960.347,00					100%	3.151.000.000,00
	2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	76.824.100,00			DPMPTSP		100%	72.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	51.093.100,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		6 Dokumen	52.000.000,00

	2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola DPMPSTP	333 unit	11.050.000,00			DPMPSTP		335 unit	15.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.050.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		1 Dokumen	15.000.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPSTP	90%	31.395.000,00			DPMPSTP		90%	31.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	9.773.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		5 Orang	6.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		10 Orang	6.000.000,00

	2	1	0	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		8	1	5	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	16.622.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSP		10 Orang	19.000.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100%	120.713.480,00			DPMPSP		100%	162.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		8	1	6	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.727.880,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSP		8 Paket	6.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		8	1	6	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16.766.600,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSP		7 Paket	41.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		8	1	6	03										

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.064.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		6 Paket	5.000.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	3.003.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		8 Paket	30.000.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	90.152.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		35 Laporan	80.000.000,00
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	477.290.000,00			DPMPTSP		100%	138.000.000,00
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	7.500.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	DPMPTSP		17 Unit	13.000.000,00

										atan, Semua Kel/De sa	UMUM					
	2	1 8	0 1	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	86.710.000,00	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DPMP TSP		21 Unit	74.000.000,00		
	2	1 8	0 1	2.0 7	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	134.780.000,00	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DPMP TSP		1 Unit	13.000.000,00		
	2	1 8	0 1	2.0 7	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.200.000,00	Kab. Pasam an Barat, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DPMP TSP		1 Unit	25.000.000,00		
	2	1 8	0 1	2.0 7	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	131.100.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		1 Unit	13.000.000,00
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	162.665.360,00		DPMPSTP		100%	144.000.000,00
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.887.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		12 Laporan	50.000.000,00
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.189.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		12 Laporan	64.000.000,00
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.589.360,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		12 Laporan	30.000.000,00

										Semua Kel/Desa					
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPSTP	100%	285.377.500,00			DPMPSTP		100%	213.000.000,00
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	38.750.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		21 Unit	81.000.000,00
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit	1.600.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPSTP		16 Unit	16.000.000,00
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	92.627.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	DPMPSTP		60 Unit	56.000.000,00

						MODAL												
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80%	25.077.000,00			Investor/ Calon Investor		90%	77.000.000,00			
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.624.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor/ Calon Investor		1 Dokumen	51.000.000,00			
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	14.453.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor dan UMKM		1 Dokumen	26.000.000,00			
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	1 peraturan	19.539.000,00			Investor / calon Investor		90%	22.000.000,00			
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												

						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.539.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor / calon Investor		1 Dokumen	22.000.000,00
168	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	0 MoU	48.791.000,00		calon Investor		3 MoU	56.000.000,00
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	48.791.000,00		calon Investor		1 dokumen	56.000.000,00
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	calon Investor		4 Dokumen	31.000.000,00
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	41.891.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	calon Investor		1 Dokumen	25.000.000,00

169	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,85%	32.971.000,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		86%	166.982.331,00
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	88%	32.971.000,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		90%	166.982.331,00
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.821.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor / calon Investor		1 Kegiatan Usaha	21.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	6.900.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Masyarakat		3000 Pelaku Usaha	121.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									

						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 Pelaku Usaha	11.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Masyarakat		10 Orang	24.982.331,00
170	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	6,40%	324.969.000,00		Investor/Pelaku Usaha		10%	194.000.000,00
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	40 laporan	324.969.000,00		Investor/Pelaku Usaha		45laporan	194.000.000,00
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya								
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	10 Kegiatan Usaha.	21.570.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Investor/Pelaku Usaha		32 Kegiatan Usaha.	17.000.000,00

	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	272 Pelaku Usaha	294.099.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Investor/ Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	101.000.000,00
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17 Kegiatan Usaha	9.300.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Investor/ Pelaku Usaha		38 Kegiatan Usaha	76.000.000,00
171	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	33.394.550,00			Pelaku Usaha/Masyarakat	Ada (100)	51.000.000,00

	2	1	0	2.0		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	70%	33.394.550,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		80%	51.000.000,00
	2	1	0	2.0	00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		33.394.550,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Masyarakat		1 Dokumen	51.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 tertuang dalam 6 (enam) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, seperti terlihat pada table berikut

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP		B		Nilai SAKIP	B			
					Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP		B		Nilai SAKIP	B			
						Level Maturitas SPIP		3		Level Maturitas SPIP	3			
						Persentase penurunan jumlah temuan BPK		60%		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	70%			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.060.701.897,00						3.717.982.331,00
	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.060.701.897,00						3.717.982.331,00
166	2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.575.960.347,00					100%	3.151.000.000,00
	2	1	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	76.824.100,00			DPMPTSP		100%	72.000.000,00

	2	1	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		8	1	1	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	51.093.100,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		6 Dokumen	52.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		8	1	1	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	25.731.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		2 Laporan	20.000.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100%	3.410.644.907,00			DPMPTSP		100%	2.376.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		8	1	2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.335.464.907,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		37 Orang/bulan	2.300.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		8	1	2	3		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.180.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		12 Dokumen	76.000.000,00
	2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	333 unit	11.050.000,00			DPMPTSP		335 unit	15.000.000,00

	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100%	120.713.480,00			DPMPPTSP		100 %	162.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.727.880,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPPTSP		8 Paket	6.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16.766.600,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPPTSP		7 Paket	41.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.064.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPPTSP		6 Paket	5.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	3.003.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	DPMPPTSP		8 Paket	30.000.000,00

	2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		8	1	7	0		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.200.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		1 Unit	25.000.000,00
	2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	131.100.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		1 Unit	13.000.000,00
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	162.665.360,00			DPMPTSP		100%	144.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
					1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.887.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		12 Laporan	50.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.189.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		12 Laporan	64.000.000,00
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					4										

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.589.360,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		12 Laporan	30.000.000,00	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	100%	285.377.500,00			DPMPTSP		100%	213.000.000,00
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	38.750.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		21 Unit	81.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit	1.600.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		16 Unit	16.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	92.627.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		60 Unit	56.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	102.800.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DPMPTSP		2 Unit	21.000.000,00	

	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya aturan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	80%	25.077.000,00			Investor/Calon Investor		90%	77.000.000,00
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.624.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor/Calon Investor		1 Dokumen	51.000.000,00
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	14.453.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor dan UMKM		1 Dokumen	26.000.000,00
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	1 peraturan	19.539.000,00			Investor / calon Investor		90%	22.000.000,00
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	19.539.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor / calon Investor		1 Dokumen	22.000.000,00

168	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	0 MoU	48.791.000,00			calon Investor		3 MoU	56.000.000,00
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pernyataan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	1 dokumen	48.791.000,00			calon Investor		1 dokumen	56.000.000,00
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6.900.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	calon Investor		4 Dokumen	31.000.000,00
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	41.891.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	calon Investor		1 Dokumen	25.000.000,00
						Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	Kab. Pasaman Barat,	85,60		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKM Perizinan	85.85		
						Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	Kab. Pasaman Barat,	85,60		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai IKM Perizinan	85.85		

169	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,85%	32.971.000,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		86%	166.982.331,00
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	88%	32.971.000,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		90%	166.982.331,00
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.821.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Investor / calon Investor		1 Kegiatan Usaha	21.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	6.900.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Masyarakat		3000 Pelaku Usaha	121.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									

						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 Pelaku Usaha	11.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Masyarakat		10 Orang	24.982.331,00
					Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah	Kenaikan Nilai Investasi Daerah	Kab. Pasaman Barat,	1,96%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kenaikan Nilai Investasi Daerah	1,96%		
					Sasaran : Meningkatkan Nilai Investasi PMDN/PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	Kab. Pasaman Barat,	1,96%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	1,96%		
170	2	185	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	6,40%	324.969.000,00			Investor/Pelaku Usaha		10%	194.000.000,00
	2	185	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	40 laporan	324.969.000,00			Investor/Pelaku Usaha		45laporan	194.000.000,00
	2	185	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								

						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	21.570.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Investor/Pelaku Usaha		32 Kegiatan Usaha.	17.000.000,00
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	272 Pelaku Usaha	294.099.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Investor/Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	101.000.000,00
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17 Kegiatan Usaha	9.300.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS -DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Investor/Pelaku Usaha		38 Kegiatan Usaha	76.000.000,00

17 1	2	1 8	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Ada (100)	33.394.550,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		Ada (100)	51.000.000,00
	2	1 8	0 6	2.0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi	70%	33.394.550,00			Pelaku Usaha/Masyarakat		80%	51.000.000,00
	2	1 8	0 6	2.0 1	000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		33.394.550,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pelaku Usaha/Masyarakat		1 Dokumen	51.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2025. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/519 /BUP-PASBAR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025; dan
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.

B. Sekretaris

1. mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
2. melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025; dan
4. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.

C. Kelompok Kerja

1. mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;

2. menganalisa gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu;
3. menganalisa dan mengevaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat ;
4. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
5. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
6. melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja 2025;
7. melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
8. melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 5 JUNI 2024



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 100.3.3.2/519/BUP.PASBAR/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Fadlus Sabi, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Ketua
Ahmad Hanif, S.IP	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
Media Tuwenti, SE, MM	Kabid Penanaman Modal	Koordinator
Rici Sandra, ST	Perencana Ahli Muda	Anggota
Iskandar Zulkarnaen Nst, SE	Staf Bidang Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan		
Sepriwenti, SE	Kabid Pelayanan Perizinan	Koordinator
Mukhlas, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Zainal Arifin, AMd	Staf Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian		
Widya Riza Lubis, S.STP, M.AP	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Koordinator
Sri Yenita, SKM, M.Kes	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Arnis, SKM, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Cindy Alfa Rizki, SE	Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan		
Ade Handayani, S.Kom	Kabid Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Koordinator
Desi Yusnita, SKM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 5 Juni 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

